## **BAB VI**

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

# 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis peneliti dilapangan pada Bab V yang telah peneliti paparkan diatas, peneliti mendapatkan sebuah hasil kesimpulan dari penelitian ini. Dilihat dari secara teoritis, berdasarkan analisis teori Richard E. Matland bahwasanya ada 3 tahapan dalam proses penealonan kandidat sehingga kandidat tersebut layak menduduki jabatan politik. Hal ini terjadi pada proses kandidasi calon kepala daerah dari Partai NasDem pada Pilkada Kota Bukittinggi Tahun 2020.

Pertama, partai melihat dari seleksi diri yang dilakukan oleh kandidat itu sendiri bagi kandidat yang layak untuk diusung pada pergelaran demokratis keharusannya memiliki ambisi dan motivasi untuk mencapai target pada dirinya itu perlu, dibalik ambisi dan motivasi yang dimiliki seorang kandidat elektabitas tinggi menjadi hal yang sangat penting bagi partai politik dalam menentukan pilihan kandidatnya bagaimana tidak, elektabilitas menjadi faktor penentu bagi partai politik dalam melihat popularitas dan keeksistensian seorang kandidat. Hal tersebut dilakukan oleh partai politik dikarenakan calon yang memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi ditengah-tengah masyarakat, partai politik mempunyai peluang besar untuk memenangkan kandidatnya pada pemilihan kepala daerah dan hal tersebut juga berdampak positif pada partai dalam hal popularitas dan elektabilitas partai semakin naik kepermukaan ditengah masyarakat.

Kedua, seleksi partai juga menjadi hal yang krusial bagi partai politik, memilih kandidat salah satu peranan penting bagi partai politik. Partai politik yang menjadi mobilisator pada pemilihan kandidat harus memiliki banyak pertimbangan, mencari calon kandidat yang sesuai dengan harapan masyarakat tidaklah suatu perkara yang mudah. Sebab, apabila suatu partai politik telah gagal dalam melakukan kegiatan seleksi maka partai politik tersebut sudah gagal dalam hal pemahaman menjadi partai politik. Karena itu partai politik harus memiliki aturanaturan yang sudah ditentukan dan disepakati oleh partai politik terlebih lagi dalam hal kegiatan penyeleksian kandidat yang dilakukan partai. Pada zaman demokratisasi era modren aturan dan gagasan yang dilakukan partai politik beragam hal ini membawa warna baru pada proses pemilihan kandidat di partai, gagasan ini dilahirkan oleh partai untuk bertujuan mengambil perhatian masyarakat dan memberi perubahan pada cara penyeleksian partai politik.

Ketiga, tahapan yang terakhir untuk dapat dikatakan seorang kandidat tersebut lolos dan layak untuk diusung pada pemilihan kepala daerah yaitu melihat dari basis dukungan dari seorang calon. Basis dukungan ini merupakan bentuk gabungan dari orang-orang atau kelompok besar berkoalisi mendukung kandidat tersebut. Para basis dukungan si calon kandidat ini dipertemukan karena adanya satu tujuan yang sama dan visi misi yang telah dipersetujukan, guna dari basis dukungan ini ialah memberi dukungan penuh pada kandidat dan mempermudah kandidat dalam hal progam-program kampanye untuk mencari suara yang banyak sehingga kandidat tersebut dapat menduduki jabatan politik. Alasan dari basis pendukung untuk memberi dukungan biasanya dilihat dari latar belakang,

lingkungan sosial, pendidikan yang telah digapai dan *track record* dari sikandidat tersebut.

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti melihat bahwa Partai NasDem dalam proses kandidasinya partai yang mengusung kandidat pasangan Irwandi-David Chalik, sudah melihat bagaimana pasangan calon ini memiliki elektabilitas, popularitas dan pendidikan yang menjamin mereka menjadi kandidat pasangan memiliki potensial yang tinggi. Dalam hal pengusungan mereka DPD Partai NasDem Kota Bukittinggi secara terstruktur melakukan penyeleksian partai menurut persyaratan dari AD/ART Partai NasDem, dengan adanya Peraturan Organisai, Partai NasDem memiliki program yang unik dinamai dengan "Indonesia" memanggil" Partai NasDem dapat mengusung orang yang berada diluar lingkup partai dengan adanya hal ini Partai NasDem terindikasi dalam mengusung calon Non-kader memang adanya. PO ini turunan dari AD/ART Partai NasDem, penjelasan aturan mekanisme lebih rinci diatur didalam PO tersebut. PAN, PKB dan Partai NasDem berkoalisi membentuk dukungan pada pasangan Irwandi-David Chalik. Dukungan ini bentuk kepercayaan partai pada calon pasangan yang telah dilihat dan diamati partai dari segi track record, pendidikan, dan latar belakang bahwasanya kandidat pasangan Irwandi-David Chalik ini mampu memimpin dan memajukan daerah Kota Bukittinggi karena pasangan Irwandi-David Chalik ini pasangan yang memiliki kemampuan yang komplit.

Partai NasDem mengadang-gadang bahwa partai ini menjadi pelopor dalam perubahan politik di Indonesia dengan upaya yang merestorasikan perpolitikan di Indonesia, Partai NasDem melahirkan gagasan politik tanpa mahar. Politik tanpa

mahar ini tidak menetapkan bagi siapa saja yang menjadi kandidat maupun dia kader atau bukan kader Partai NasDem tetap tidak ditentukan mahar. Ini menjadikan Partai NasDem satu-satunya partai yang menganut gagasan ini, dikarenakan hal ini sangat tidak lumrah terjadi didalam sebuah partai. Menurut Partai NasDem mahar adalah bentuk dari politik transaksional yang dapat menimbulkan korupsi, maka karena adanya gagasan seperti ini dapat menekan cost politic yang selalu menjadi penghambat dalam proses kandidasi. Tetapi didalam pelaksanaan gagasan yang menjadi unggulan dalam Partai NasDem ini, masih dianggap rumpang. Faktanya implementasi politik tanpa mahar yang dilakukan oleh DPD Partai NasDem dalam pelaksanaan proses kandidasi calon kepala daerah pada Pilkada Kota bukittinggi kemarin masih terbilang kurang memuaskan dan hanya dianggap sebagai landasan teori dari Partai NasDem.

## 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, mengenai anggapan atas proses kandidasi calon kepala daerah dari Partai NasDem pada Pilkada Kota Bukittinggi Tahun 2020 adapun saran yang peneliti ajukan, baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

## 6.2.1 Saran Teoritis

 Kajian terkait tahapan dari basis dukungan yang dilihat pada proses kandidasi calon kepala daerah masih terbilang minim. Sebagai tahapan yang cukup penting pada pengusungan calon kandidat, kandidat harus memiliki dukungan dari partai yang berkoalisi untuk mempermudah kandidat dalam proses pencalonan. Masih jarang peneliti temui pada jurnal-jurnal yang berkaitan, sehingga peneliti menjadikan buku dari Jullie Ballington dan Azza Karam sebagai bahan utama dalam penelitian ini dengan keterbatasan yang hanya menggunakan terjemahan seadanya.

2. Keterbatasan peneliti dalam melihat fenomena Pilkada yang terjadi pada proses kandidasi calon kepala daerah dari Partai. Peneliti mengharapkan keberlanjutan dari penelitian ini oleh peneliti lainnya dengan pembahasan proses kandidasi calon kepala daerah pada Pilkada dengan 3 tahapan yang dipaparkan oleh Richard E. Matland.

### 6.2.2 Saran Praktis

1. Memang ide dari Partai NasDem ini cukup gemilang dapat memajukan demokratisasi yang ada di Indonesia dan dapat menakan terjadinya korupsi dari pemimpin-pemimpin ditingkat lokal maupun nasional. Namun didalam prakteknya DPD Partai NasDem Kota Bukittinggi masih banyak memiliki kekurangan pada segi pelaksanaan gagasan yang diluncurkan untuk mengusung kandidat kepala daerah. Menjelaskan dengan koalisi bagaimana bentuk dari biaya dalam membantu kandidat saat masa kampanye karena setiap aturan-aturan yang ada dipartai lain berbeda-beda, maka dari itu sebaiknya Partai NasDem disaat berkoalisi dengan partai lain untuk pengusungan calon kandidat sebaiknya dimusyawarahkan terlebih dahulu dan mencarikan solusinya dalam hal biaya. Kerugian pada partai juga tidak bisa dianggap masalah sepele bagi Partai NasDem secepatnya mengevaluasi dan mencari jalan keluar demi

memantapkan gagasan politik tanpa mahar di Indonesia dan kelangsungan berdirinya partai.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran berpolitik dalam mekanisme pengusungan calon kepala daerah bagi partai-partai lain. Gagasan yang telah lahir dari Partai NasDem patut dicontoh oleh partai lainnya, pada dasarnya partai politik ialah pembawa perubahan pada kemajuan negara, partai politik melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas untuk tingkat lokal maupun nasional. Dalam berpolitik, mahar tidak menjadi tolak ukur sebagai syarat dalam pencalonan kandidat pada pergelaran demokratis di Indonesia.

